

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, di Sumatera Utara telah banyak didirikan perguruan Tinggi. Semua perguruan tinggi tersebut ada yang terakreditasi A,B,C dan ada juga yang belum terakreditasi. Hal ini membuat pendidikan dan gelar menjadi semakin mudah diraih, serta persaingan kerja di antara lulusan-lulusan perguruan tinggi menjadi ketat. Di era globalisasi saat ini persaingan menjadi semakin ketat dan hanya mereka yang siap dan mempunyai bekal serta sikap profesionalisme yang memadai saja yang dapat tumbuh dan bertahan. Setiap profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh suatu profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini. Namun, selain kemampuan dan keahlian khusus, suatu profesi harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus di taati oleh pihak yang harus di taati oleh pihak menjalankan profesi tersebut.

Faktor-faktor yang diperlukan untuk mengantisipasi keadaan ini adalah kompetensi dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan perkembangan perkembangan jaman, dimana keahlian merupakan salah satu aspek penting dalam tenaga kerja yang dibutuhkan. Kompetensi dan profesionalisme dapat menjadi dua aspek penting dalam perwujudan keahlian.

Kompetensi merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Dimana berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya. Profesionalisme merupakan sifat yang harus dimiliki oleh 1 g mana berkaitan dengan profesi yang di jalankannya. Salah satu hal yang merupakan anan penting dalam menjaga kompetensi dan

profesionalisme adalah adanya kode etik. Kode etik merupakan pedoman tingkah laku yang mengatur tingkah laku para profesional dalam bertindak.

Etika profesional bagi akuntan di Indonesia di atur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ikatan Akuntan Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan Indonesia yang beranggotakan auditor dari berbagai tipe (auditor pemerintah, auditor intern, dan auditor independen), akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik, serta akuntan yang bekerja di luar profesi auditor. **“Tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik.”**¹

Etika suatu profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana selama ini perilaku etis sering diabaikan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi diuntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku.

Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan akuntan public, akuntan intern, maupun akuntan pemerintahan. Pelanggaran etika oleh akuntan public misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat berupa perekeyasaan data akuntansi untuk menunjuka kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang

¹ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, **Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 159

sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya di periksa.

Kode etik juga diperlukan agar menjaga masyarakat atau pihak yang berhubungan dengan profesional dapat senantiasa mempercayai bahwa para profesional telah berkompeten, independen, dan bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan akuntan bertindak sebagai penyedia informasi keuangan bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan informasi keuangan dapat berupa manajemen perusahaan, investor, pemerintah maupun pihak lainnya. Kode etik di dalam sektor jasa akuntansi disebut dengan Kode Etik Akuntan.

Pendidikan yang memegang peranan penting dalam pemahaman akan kode etik sangatlah diperlukan di dalam menghasilkan akuntan – akuntan yang berkualitas tinggi. Maka dari itu, perguruan tinggi, sebagai tempat pendidikan para mahasiswa yang merupakan calon akuntan perlu memberikan pemahaman atas Kode Etik Akuntan. Dengan pemahaman kode etik yang baik, maka para calon akuntan tersebut akan dapat mengamalkan dan melaksanakan pekerjaannya dengan sesuai, sehingga mempunyai persiapan diri yang matang dalam memasuki ketatnya dunia persaingan kerja nantinya.

Penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dikarenakan karena bagi perguruan tinggi swasta baik yang terakreditasi B dan C pada umumnya mahasiswa tersebut sama-sama mempelajari mata kuliah Auditing dan Etika Bisnis dan Profesi, oleh karenanya apakah tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kode etik akuntan di perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B dan yang terakreditasi C berbeda ? dengan alasan ini penelitian ini dilakukan untuk tingkat pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa akuntansi.

Sebagai acuan, Penelitian mengenai kode etik sebelumnya telah dilakukan oleh Siek Yen (2003). Penelitian tersebut mengkaji tentang Persepsi Akuntan Publik dan Non-Publik di Kota Medan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa akuntan di kota medan secara signifikan tidak memiliki persepsi yang positif terhadap kode etik dan tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik dan non-publik di kota medan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ronald Setiawan (2010). Penelitian tersebut mengkaji tentang Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa pendidikan profesi akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan.

Perbedaan antara kedua penelitian inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pemahaman Kode Etik di Kalangan Mahasiswa, dimana seperti yang diketahui, persepsi dan pemahaman memiliki pengertian yang hampir sama. Peneliti juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi perguruan tinggi swasta yang akreditasi B dengan Perguruan tinggi swasta akreditasi C yang ada di Kota Medan. Hal ini dikarenakan peneliti melihat adanya perbedaan yang membedakan antara perguruan tinggi swasta yang akreditasi B dan perguruan tinggi swasta yang akreditasi C.

Perbedaan tersebut adalah ketersediaan fasilitas. Ketersediaan fasilitas yang ada di perguruan tinggi swasta yang akreditasi B lebih lengkap dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta yang akreditasi C. Perbedaan kedua

Bedasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik menuangkannya di dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :**“Pemahaman Kode Etik Akuntan di Kalangan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta Di Medan.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditegakkannya Kode Etik Akuntan ataupun etika profesi harus dimulai dari pemahaman dan penghayatan dengan kesadaran penuh sedini mungkin, yaitu sejak bangku perkuliahan. Dengan adanya pemahaman yang lebih dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi berbagai pelanggaran etika. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan di kemukakan pada penelitian ini adalah Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi perguruan tinggi swasta yang akreditasi B dan perguruan tinggi swasta yang akreditasi C di Kota Medan tentang Kode Etik Akuntan Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti membuat tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B dan perguruan tinggi swasta yang terakreditasi C di Kota Medan tentang Kode Etik Akuntan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan penulis khususnya mengenai pemahaman Kode Etik Akuntansi pada mahasiswa akuntansi, serta sebagai wadah dalam rangka menerapkan teori yang telah di pelajari.

2. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Sebagai wahana pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini. Serta bermanfaat untuk membantu mahasiswa dalam pemahaman Kode Etik Akuntan.

3. Bagi Masyarakat,

Dapat berguna untuk sumber informasi, bahan pembandingan bagi penelitian lainnya, dan menjadi bahan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan dalam pemilihan karir sebagai akuntantan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Auditing

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, Kode Etik Akuntan merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan auditor dengan klien, auditor dengan sejawat serta antar profesi dengan masyarakat. Etika profesi akuntan dipelajari secara khusus dalam bab tersendiri dalam mata kuliah auditing. Maka sebelumnya membahas tentang etika, peneliti akan memaparkan dan menjelaskan tentang pengertian auditing terlebih dahulu.

Menurut Sukrisno Agoes mengatakan bahwa:

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaeran laporan keuangan tersebut.”²

2.2. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang di pelajari. **“Pemahaman merupakan suatu proses konstruktivitas sosial dalam memahami berbagai teks, tidak hanya semata-mata memahami makna kata-kata dan kalimat dalam suatu teks kalimat saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibaca”³**

8

2.3 Pengertian Etika

² Sukrisno Agoes, **Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik**, Edisi 4 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. 4

³ Miftah Thona, **Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya**. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011, hal. 139

Menurut Sukrisno Agoes mengatakan bahwa: **“Etika (Ethics) berasal dari kata Yunani ethos (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.”**⁴

Menurut Manuel Valasques mengatakan bahwa:

Istilah etika memiliki beragam makna yang berbeda. Salah satu maknanya adalah: prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Kadang kita menggunakan istilah etika personal, misalnya, ketika mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya dan menggunakan istilah etika akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan profesional akuntan.⁵

Menurut Sofyan Harahap mengatakan bahwa;

Secara sistematis, etika dapat di kelompokkan sebagai berikut. Dari sudut umum dan khusus, etika dapat dibagi dalam beberapa kelompok:

- 1. Etika umum adalah etika yang berlaku umum, tidak hanya pada pihak tertentu.**
- 2. Etika khusus adalah etika yang berlaku paada kelompok tertentu.**
etika ini di kelompokkan menjad:
 - a. Etika individual**
 - b. Etika social**
 - 1. Etika keluarga**
 - 2. Etika politik**
 - 3. Etika lingkungan**
 - 4. Etika profesi**
 - 5. Dan lain-lain.**⁶

Menurut Agus Ariyanto mengatakan bahwa etika di bagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusiia terhadap diri sendiri**
- 2. Etika sosial, yaitu suatu etika yang berbicara mengenai kewajiban dan hak, pola dan perilaku manusia sebagai mahluk sosial dalam berinteraksi dengan sesamanya.**
- 3. Etika lingkungan hidupm, yaitu sebuah etika yang saat ini sering dibicarakan sbagai cabang dari etika khusus.**⁷

⁴ Sukrisno Agoes, **Op Cit**, hal 26

⁵ Manuel Velasques, *Business Ethics Concepts And Cases, 5th Edition*, **Etika Bisnis Konsep dan Kasus**, Alih Bahasa: Ana Purwaningsih, Kurnianto dan Totok Budisantoso, Edisi Kelima: ANDI, Yogyakarta, 2005, hal. 7.

⁶Sofyan S. Harahap, **Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam**, Edisi Pertama : Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 26.

Menurut K. Bertnes mengatakan bahwa ada empat macam perbedaan antara etiket dan etika ;

1. **Etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus di lakukan manusia, sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh di lakukan atau tidak.**
2. **Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedangkan etika selalu berlaku, juga jika tidak ada saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain.**
3. **Etiket bersifat relatif, sedangkan etika bersifat absolute dan berlaku universal.**
4. **Etiket berbicara secara lahiriah, sedangkan etika menyangkut manusia dari dalam.⁸**

Dari kelima pengertian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa etika adalah prinsip dan nilai moral yang akan mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan tindakannya.

2.4 Etika Profesi

Menurut Arrens, Elder, Beasly mengatakan bahwa :

Istilah professional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hokum dan peraturan masyarakat. Akuntan public, sebagai professional, mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktis, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan perilaku tingkat professional yang tinggi oleh suatu profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan public atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.⁹

Etika professional ditetapkan oleh organisasi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip-prinsip perilaku professional lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam bentuk suatu kode etik.

Adapun peranan etika dalam profesi yaitu :

⁷ Agus Arijanto, **Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis**, Edisi Pertama : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 26.

⁸K.Bertnes, **Etika**, Edisi Kesepuluh : Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007, hal. 9.

⁹Arrens. Elder, Beasly, **Auditing dan Jasa Assurance**, Edisi Keduabelas : Erlangga, Jakarta, hal. 105

1. Nilai-nilai etika itu tidak hanya memiliki satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.
2. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan
3. kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.
4. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yaitu tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut.

2.5 Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Menurut Ihyul Ulum M.D mengatakan bahwa :

Etika profesi bagi akuntan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 1973, kemudian disempurnakan tahun 1981 dan 1986. Selanjutnya etika tersebut disempurnakan lagitahun 1987 dan tahun 1994 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (KEAI). KEAI adalah peddoman bagi para anggota IAI agar objektif dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan profesinya.¹⁰

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang di anggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bias di paksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang di terima oleh

¹⁰ Ihyul Ulum M.D, **Audit Sektor Publik Suatu Pengantar**, Edisi Pertama : Bumi aksara, Jakarta, 2009, hal. 8

profesi itu sendiri yang bisah mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk di laksanakan dengan tekun dan konsekuen.

Kode etik yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur prilaku anggota IAI secara keseluruhan dengan pembagiannya sebagai berikut :

- 1 Kode Etik Akuntan
- 2 Kode Etik Kompartemen

Kode etik akuntan adalah kode etik yang mengatur seluruh anggota IAI secara umum.Kode Etik Akuntan Kompartemen adalah kode etik yang mengatur masing–masing kompartemen yang terdapat didalam IAI. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari:

1. Prinsip Etika Akuntan,
2. Aturan Etika Akuntan, dan
3. Interpretasi Aturan Etika Akuntan.

Prinsip Etika Akuntan adalah prinsip yang harus ditaati oleh semua anggota IAI.Aturan Etika Akuntan hanya mengikat anggota kompartemen yang mensahkan Aturan Etika tersebut.Interpretasi Aturan Etika Akuntan adalah interpretasi yang dikeluarkan pengurus kompartemen untuk menanggapi anggota–anggota dan pihak–pihak yang berkepentingan, tanpa membatasi lingkup dan penerapannya.

Prinsip Etika Akuntan sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika dengan masing-masing penjelasan seperti dibawah ini.

1. Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat.Sejalan

dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Profesi akuntan tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan prestasi tinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi hal ini,

anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.

Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik, misalnya: auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberi pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal, eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi, auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar, ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak dan konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritasi akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.

4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka di berbagai situasi. Anggota

dalam praktik akuntan publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit intern yang bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintahan. Mereka harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor berikut.

- 1 Adakalanya anggota dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
- 2 Tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonable*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektivitas anggota.
- 3 Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.
- 4 Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip obyektivitas.
- 5 Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainmen yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau

Pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggotanya seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme yang tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah.

1. Pencapaian Kompetensi Profesional

Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesionalnya dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2. Pemeliharaan Kompetensi Profesional

Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional anggota. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran

untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman, dan pertimbangan yang diperlukan memadai tanggung jawab yang harus dipenuhinya.

Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna, dan mematuhi standar teknis, dan etika yang berlaku. Kehatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi jasa yang diperoleh melalui jasa profesional yang

diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlibat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional.

Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.

1. Apabila pengungkapan diijinkan

Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.

2. Pengungkapan diharuskan oleh hukum

Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum dan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum oleh klien.

3. Ketika kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan: untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika, untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan untuk menaati penelahaan mutu (atau penelahaan sejawat) IAI atau badan profesional lainnya dan untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

2.6 Pengertian Akuntan

Akuntan adalah orang yang menjalankan pekerjaan Akuntansi sesuai dengan UU tahun 1954 tentang jabatan akuntan. Menurut undang-undang tersebut yang berhak memakai gelar akuntan adalah :

1. Sarjana akuntansi lulusan perguruan Tinggi Negeri dan sarjana akuntansi lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang izasahnya di persamakan oleh Panitia Ahli pertimbangan Persamaan Izasah Akuntan.
2. Terdaftar dalam register Negara yang di selenggarakan oleh Departemen Keuangan.

Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Nomor 179/U/2001, lulus S1 jurusan akuntansi berkesempatan menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di perguruan tinggi yang telah di tunjuk oloeh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Mereka yang telah menempuh Pendidikan Profesi akuntansi (PPAk) berhak memperoleh sebutan profesi Akuntan (Akt), dan juga semakin berpeluang meniti karir sebagai auditor pemerintah, auditor internal, akuntansi manajemen, akuntan pendidik, akuntan perpajakan, akuntan public, maupun akuntan system informasi.

2.7 Pengertian Mahasiswa Akuntansi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia “Mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi.”**Menurut Warren, Reeve, Fees “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihka-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”¹¹**Dari kedua pengertian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengertian mahasiswa akuntansi adalah

¹¹ Warren C., James M. Reeve, dan Philip E. Fess, 2005. *Accounting*, 21 Edition, South-Western, Singapore. Hal. 10

orang yang sedang mempelajari sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis di perguruan tinggi. Pengertian mahasiswa akuntansi dalam penelitian ini adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi jurusan akuntansi yang telah menempuh mata kuliah auditing dan teori akuntansi. Persyaratan ini didasarkan pada asumsi bahwa para mahasiswa tersebut telah mempunyai pemahaman tentang prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik IAI.

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelum yang dilakukan berkaitan dengan persepsi terhadap etika dan kode etik menunjukkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya :

Siek Yen meneliti tentang Persepsi Akuntan Publik dan Non-Publik di Kota Medan Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia. Objek penelitian adalah akuntan di kota Medan yang dikelompokkan ke dalam: (1) Akuntan Publik dan (2) Akuntan Non-Publik. Sampel yang diambil adalah sebanyak 42 responden, dimana untuk masing-masing responden diberikan 35 pernyataan yang dapat mencerminkan persepsi mereka terhadap kode etik. Dari data tersebut dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya, kemudian pengujian asumsi, dan pengujian rerata (mean) untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan di Kota Medan secara signifikan tidak memiliki persepsi yang positif terhadap kode etik dan tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik dan non-publik di Kota Medan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia.¹²

Penelitian oleh Arisetyawan meneliti tentang : Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah Akuntan Publik yang berada di Semarang dan mahasiswa pendidikan profesi akuntansi Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sampel yang diambil adalah sebanyak 200 responden dimana untuk masing-masing responden diberikan 12 pernyataan. Pengujian reliabilitas data menggunakan *Cronbach alpha*, dan pengujian normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Untuk pengujian hipotesis menggunakan *Independent Sample T-Test*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat

¹² Siek Yen, 2003. *Persepsi Akuntan Publik dan Non-Publik di Kota Medan Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa pendidikan profesi akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan.¹³

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

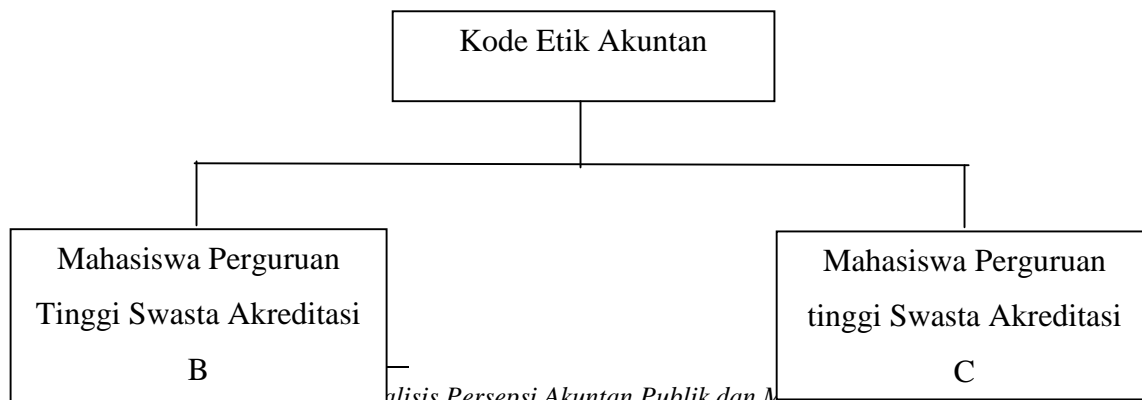
Nama Peneliti	Hasil Penelitian
Siek Yien (2003)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan di kota Medan secara signifikan tidak memiliki persepsi yang positif terhadap kode etik dan tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik dan non-publik di kota Medan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia.
Arisetyawan (2010)	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa pendidikan profesi akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan.

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

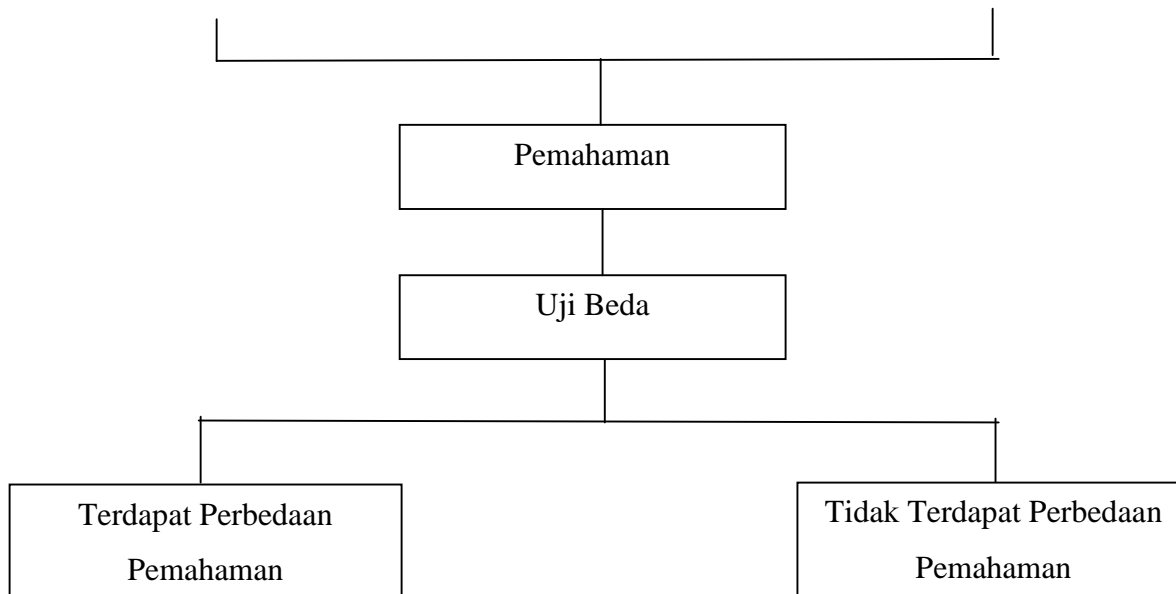
2.9 Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dibuat kerangka teori sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Teori



Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.



Keterangan :

Kode etik digunakan dalam keanggotaan sebagai pedoman dan peraturan bagi semua anggota untuk melaksanakan tanggung jawab professional dan menyatakan prinsip dasar dari perilaku etis dan professional. Untuk mahasiswa jurusan akuntansi pada perguruan tinggi swasta akreditasi B maupun perguruan tinggi swasta akreditasi C, pemahaman terhadap kode etik sebaiknya dimulai sejak di bangku kuliah sehingga Kode Etik Akuntan yang ada benar-benar di pahami untuk dilaksanakan pada praktek kerja nantinya. Mencermati hal tersebut, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana pemahaman terhadap persoalan-persoalan etika yang akan dihadapi oleh mahasiswa perguruan tinggi swasta yang akreditasi B maupun perguruan tinggi swasta akreditasi C apakah ada kesamaan atau perbedaan antara dua kelompok tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan uji beda dan uji satu sampel. Hasilnya akan memberikan kemungkinan adanya perbedaan atau persamaan pemahaman diantara kedua kelompok tersebut

dan kemudian memberikan kemungkinan adanya pemahaman positif atau negative dari penggabungan kedua kelompok tersebut.

2.10 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan uraian teoritis di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Terdapat perbedaan pemahaman Kode Etik Akuntan antara mahasiswa perguruan tinggi swasta akreditasi B dan mahasiswa perguruan tinggi swasta akreditasi C.

H_2 : Tidak terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa perguruan tinggi swasta akreditasi B dan mahasiswa perguruan tinggi swasta akreditasi C.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi di perguruan tinggi swasta yang ada di kota medan yang terakreditasi B dan terakreditasi C.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk bialangan atau data non angka yang bersifat deskriptif dalam bentuk informasi tulisan (kuesioner) yang diperoleh dari mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang berkompeten memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan.Data tersebut adalah data yang telah di olah dari jawaban kuesioner yang telah dibagikan kepada responden.

3.2.2 Sumber Data

Untuk melengkapi data yang digunakan, maka penulis memperoleh data yang bersumber dari data primer dan data sekunder :

1. Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: **“Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.”**¹⁴Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada masing-masing responden.
2. Menurut Burhan Bungin, mengatakan bahwa: **“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.”**¹⁵Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga Kopertis Wilayah I melalui web kopertis yang menunjukkan perguruan tinggi di kota medan yang membuka jurusan akuntansi, dan jenjang akreditasi dari masing-masing perguruan tinggi tersebut

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Mardalis dalam kamus riset karangan Komaruddin mengatakan bahwa: **“Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.”**¹⁶

Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan populasi adalah mahasiswa dari perguruan tinggi yang memiliki peringkat akreditasi B dan C. berdasarkan kriteria tersebut, maka perguruan yang menjadi populasi penelitian berjumlah 36 perguruan tinggi. Daftar perguruan tinggi yang menjadi populasi dapat dilihat pada lampiran 1. Dari ke 36 perguruan tinggi tersebut

¹⁴ Moh, Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam : Ghalia Indonesia, Jakarta, Oktober 2005, hal 50

¹⁵ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif**, Edisi Kedua. Cetakan ke-6 : KENCANA MEDIA GROUP, Jakarta, Juli 2011, hal 132

¹⁶ Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Ketiga belas : Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 50

peneliti melakukan pengeliminasian. Pengeliminasian dilakukan dengan cara mendata ke 36 perguruan tinggi tersebut dengan meninjau perguruan tinggi yang menerapkan matakuliah *Auditing* dan Etika Bisnis dan profesi yang ada pada kurikulum perguruan tinggi tersebut.

3.3.2 Sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Menurut Abdurrahmat Fathoni, mengatakan bahwa “**Sampel merupakan wakil sah bagi populasi sasaran, bukan bagi seluruh populasi sampling.**”¹⁷

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi D3 dan S1 yang telah atau sedang mengambil matakuliah *Auditing* dan Etika Bisnis dan Profesi. Alasan pemilihan kriteria sampel karena pembahasan tentang kode etik akuntan dipelajari pada mata kuliah *Auditing* dan Etika Bisnis dan Profesi.

Jumlah sampel yang akan dipergunakan ditetapkan dengan pertimbangan sampel minimum. Alasan penggunaan jumlah sampel minimum dikarenakan total jumlah seluruh mahasiswa akuntansi yang telah atau sedang mengambil mata kuliah *auditing* dan etika bisnis dan profesi untuk perguruan tinggi terpilih adalah terlalu banyak sehingga akan menjadi kurang efisien, dan juga kurang efektif dimana total mahasiswa perguruan tinggi swasta akreditasi B adalah sangat sedikit bila dibandingkan dengan total mahasiswa perguruan tinggi swasta akreditasi C. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi korelasional, dimana untuk mengambil jumlah sampel yang dibutuhkan minimal 30 sampel untuk menguji ada tidaknya

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, **Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi**, Cetakan Peertama, Januari 2006, hal. 103

hubungan, dan untuk studi kausal-komparatif, minimal 30 subjek per group. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang untuk masing-masing perguruan tinggi yang terpilih.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literature karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan informasi dengan membagikan kuesioner. Kuesioner yaitu pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner yang diajukan kepada responden berupa daftar pertanyaan tertutup dan terbuka. Daftar pertanyaan yang tertutup berisi pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya telah disediakan dengan menggunakan skor. Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: **“Skala Likert menggunakan ukuran ordinal, karenanya, hanya dapat membuat ranking, tetapi tidak dapat diketahui berapa kali satu responden lebih baik atau lebih buruk dari responden lainnya di dalam skala.”**¹⁸1 (Sangat Tidak Setuju) 2 (Tidak Setuju) 3 (Ragu-Ragu) 4 (Setuju) 5 (Sangat setuju). Untuk skor 5 mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa sangat tinggi. Untuk skor 4 mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa tinggi. Untuk skor 3 bahwa pemahaman mahasiswa cukup tinggi. Untuk skor 2 bahwa pemahaman mahasiswa rendah. Untuk skor 1

¹⁸Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesembilan : Ghalia Indonesia, Bogor, 2014,hal. 338

bahwa pemahaman mahasiswa sangat rendah..untuk pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang jawabannya berupa pendapat yang disampaikan oleh responden.

- a. Jawaban A = Sangat Setuju di beri skor 5
 - b. Jawaban B = Setuju di beri skor 4
 - c. Jawaban C = Cukup Setuju diberi skor 3
 - d. Jawaban D = Tidak Setuju diberi skor 2
 - e. Jawaban E = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
3. Mengakses *Website* dan situs-situs untuk memperoleh informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman

Pemahaman merupakan suatu proses konstruktivitas sosial dalam memahami berbagai teks, tidak hanya semata-mata memahami makna kata-kata dan kalimat dalam suatu teks kalimat saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibaca.

2. Kode Etik Akuntan

Kode Etik Akuntan Indonesia adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Konstruksi yang membuat variable penelitian di ambil dari delapan prinsip-prinsip etika dalam kode etik akuntan yang di tetapkan pada kongres Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 yaitu prinsip tanggung jawab profesi, prinsip kepentingan public, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian professional, prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku professional serta prinsip standar teknis.

3. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel yang digunakan adalah Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban yang merupakan skala jenis ordinal.

3.6 Metode Pengolahan Data

Selanjutnya agar data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (validitasnya) dan keandalannya (realibitas), maka dilakukan pengolahan data. Langkah-langkah pengolahan data melalui tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* Yaitu meneliti daya yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner, untuk melihat apakah catatan-catatan tersebut sudah terata baik dan siap untuk proses selanjutnya.
2. *Coding* Yaitu upaya mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden menurut macamnya. Klasifikasi ini dilaksanakan dengan memberi tanda pada masing-masing jawaban
3. *Tabulating* Yaitu proses penyusunan data kedalam bentuk tabel. Jika sudah pada tahap ini maka dapat dilanjutkan sereangkaian proses analisis yang diperlukan.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Maka kualitas kuesioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini.

Menurut Mardalis mengatakan bahwa:”**Validitas suatu instrumen menunjukkan suatu alat ukur yang dapat mengukur sejauh mana kebenaran alat itu untuk mengukur sesuatu yang diperlukan, atau seberapa kesasihannya.**”¹⁹ Model pengujian menggunakan pendekatan *Pearson correlation* untuk menguji validitas pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. Perhitungan ini kan dilakukan dengan bantuan computer program SPSS 20 (*Statistical Package for Social Science*).

3.7.2 Pengujian Reliabilitas

Reabilitas atau keterandalan suatu instrumen sebagai alat ukur dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran alat ukur tersebut cocok digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur sesuatu. Reliabilitas instrument di perlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode *cronbach alpha* (). Pengujian ini dilakukan dengan bantuan computer program SPSS 20 (*Statistical Package for Social Seince*). koefisien *Cronbachalpha* yang lebih besar dari 0,6 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrument.

3.8 Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang dianalisa telah terdistribusi dengan normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas juga digunakan untuk menentukan statistik yang akan digunakan selanjutnya dalam pengujian hipotesis. Apabila data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal, maka akan digunakan statistik parametrik untuk pengujian hipotesis, sedangkan apabila data yang diperoleh tidak berdistribusi

¹⁹ Mardalis, **Metode Penelitian**, Suatu Pendekatan Proposal, Ed. 1, Cet. 12. Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hal. 60

normal, maka akan digunakan statistik non-parametrik untuk pengujian hipotesis. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *SPSS Kolmogrov-Smirnov Goodness of Fit Test*.

3.9. Pengujian Hipotesis

Menurut Sunardi Suryabrata mengatakan bahwa “ **Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara kebenarannya**”²⁰ Analisis utama adalah pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik *Independent Sample t-test* dengan menggunakan bantuan program *Statistical Packages for Social science (SPSS)* karena sampel yang di uji terdiri dari dua kelompok yang saling independen dan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pemahaman diantara kelompok sampel. *Independent Sample t-test*, prinsipnya ingin mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi, dengan membandingkan dua mean sampelnya. Pengujian hipotesis Uji beda-tes dengan sampel Independen (*Independent Sample t-test*) digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Ada dua tahapan analisis yang dilakukan dalam uji beda:

1. Pertama menguji apakah asumsi variance populasi kedua sample tersebut sama atau berbeda dengan melihat nilai levene test.
2. Kedua dengan melihat nilai *t-test* untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan. Pengambilan keputusan berdasarkan :

Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_2 diterima.

Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka H_1 diterima H_2 ditolak.

²⁰Sunardi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 21

